

SKRIPSI
DESTINASI WISATA BANTIMURUNG TAHUN 1919-1993



Oleh:
MUHAMMAD RIJAL
F061191029

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

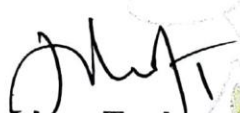
HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat pengesahan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor 1154/UN4.9.1/KEP/2023 pada tanggal 13 September 2023 dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul, "Destinasi Wisata Bantimurung Tahun 1919-1993" yang di susun oleh Muhammad Rijal. F061191029 untuk diteruskan kepada panitia ujian skripsi Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum
NIP. 197811202008122002


Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A
NIP. 196012311991031008

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia Ujian Skripsi

Mengetahi



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Destinasi Wisata Bantimurung Tahun 1919-1993
Nama Lengkap : Muhammad Rijal
NIM : F061191029

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 2 September 2024 dan dinyatakan sah memenuhi syarat untuk lulus pada program sarjana di Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin.

Pembimbing I



Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum
NIP. 197811202008122002

Pembimbing II



Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A
NIP. 1960123119910310081

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A
NIP. 19640716 199103 1 010

Ketua Departemen
Ilmu Sejarah



Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 20080 11 011

PENGESAHAN UJIAN

Destinasi Wisata Bantimurung Tahun 1919-1993

Oleh

Muhammad Rijal

F061191029

Skripsi ini telah diuji pada Senin 2 September 2024 dinyatakan lulus.

Makassar 2 September 2024

1. **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum** Ketua :

2. **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A** Sekretaris :

3. **Dr. Ilham, S.S., M.Hum** Penguji I :

4. **Lili Evita, S.S., M.Hum** Penguji II :

5. **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum** Pembimbing I :

6. **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A** Pembimbing II :



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Rijal

NIM : F061191029

Departemen : Ilmu Sejarah/Strata 1 (S1)

Dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

DESTINASI WISATA BANTIMURUNG TAHUN 1919-1993

Adalah karya ilmiah saya sendiri. Karya ilmiah ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi (Universitas Hasanuddin). Penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat di dalamnya unsur plagiarasi dan dapat dibuktikan metode historiografinya, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 6 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rijal

KATA PENGANTAR

Apapun yang terjadi tetaplah bernafas (Jack Kahunalaguna)

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Destinasi Wisata Bantimurung Tahun 1919-1993” dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra pada jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan ini terdapat banyak hambatan dan kendala yang dialami. Namun berkat ikhtiar, kerja keras serta bimbingan, arahan, bantuan dan doa dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih oleh berbagai pihak-pihak yang ikut andil dalam membantu pengerjaan skripsi. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis **Sarfiah** dan **Subandi** yang selalu memberikan dukungan, dorongan, dan doa baik secara material maupun non material. Serta terimakasih telah menjadi tempat bercerita banyak hal, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
2. Terimakasih kepada Mantan Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Periode (2014-2022) dan Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** periode (2022-sekarang) Dekan Fakultas Ilmu Budaya **Prof. Dr. Akin Duli, M.A**, beserta jajarannya.

3. Terimakasih banyak kepada dosen pembimbing yang skripsi **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum**, dan **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag**, yang senantiasa membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada Kepala Departemen Ilmu Sejarah **Dr. Ilham, S.S., M.Hum**.
5. Dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama masa studi penulis: kepada **A. Lili Evita, S.S., M.Hum**, selaku Pembimbing Akademik (PA); Kemudian kepada **Dr. Muhammad Bahar Akase Teng, LCP, M.Hum.**; **Amrullah Amir , S.S., M.A., Ph.D.**; **Dr. Nahdia Nur M.Hum.**; **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.**; **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.**; **Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.**; **Dr. Muslimin A.R. Effendy, M.A.**; **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.**; **Fajar Sidiq Limola, S.S., M.Hum.**; Kepada Alm. Bapak Prof. **Rasyid Asba, M.A.**; **Mendiang Ibu Margariet Lapia Moka, S.S., M.S.**
6. Bapak **Udji Usman Pati S.Sos**, Selaku Kepala Sekretariat Departemen Ilmu Sejarah. Terimakasih telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi
7. Kepada Mama Aji **Hj. Kanang** yang telah merawat penulis dari balita hingga sampai sekarang.
8. Kepada keluarga besar penulis Tante, Paman dan Sepupu-sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan dan dorongan.
9. Kepada Adik Penulis **Nur Khalis** yang selalu memberikan bantuan-bantuan dalam pengerjaan skripsi terutama dalam memperbaiki kendaraan penulis.

10. Pegawai-pegawai Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terutama kepada **Kak Kasma, Kak Hasnah** dan **Ibu Nila** yang telah membantu penulis dalam pencarian arsip dan bacaan literatur.
11. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dalam proses pengumpulan data.
12. Teman dekat penulis **Fitrah Nur Akbar, M. Rifqi Taufiqurrahman, Muhammad Amin, Hery Andry Kiswanto, Arif Zuladli, Candra Wijaya, Amadeus Elsadhay, dan Muh Arjun Saputra, Akzan, Salwan, Joko dan Atika Putri Sari.**
13. Teman-teman penulis **Nur Halisa, Julia Nur Fadila , Nirmalasari, Selvi Antarini, Nilajuniartika, Jamil Haidir, Andi Alif, Joko, Farid dan Miftahul Khaerah.**
14. Teman-teman Sejarah angkatan 2019 **Widya Nur Aqsa, Erwin Saputra, Rudianto, Dea Delin Sambira, Tri Novianti Sallata, Adlika Bela, Baso Fahrizal, Baso Mappangara, Risman.** dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya.
15. Teman-Teman KKNT Perhutanan Sosial Bone 108 posko 09 Samaenre **Uli, Eki, Mey , Syifa Cwan, Meli, Muti, Yusril, Adit, Mirna, dan Syila.**
16. Kepada Narasumber Penulis Ibu **Rahmatiah** selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Maros, Bapak **Suardi** selaku kepala pengelola destinasi wisata Bantimurung, Bapak Tahari Pengendali Sistem Hutan Ahli Madya serta narasumber-narasumber lain **Hayat, Rendi, Nurdin Polo dan**

Syamsiah, yang telah meluangkan waktunya dan membantu dalam menyelesaikan skripsi

17. Teman-teman Organisasi Daerah HPPMI Kabupaten Maros.

18. Kepada Pihak-Pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Makassar, 3 September 2024

Muhammad Rijal

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN UJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Tinjauan Pustaka	12
1.6.1 Penelitian Yang Relevan	12
1.6.2 Landasan Konseptual	17
1.7 Metode Penelitian	22
1.8 Sistematika Penelitian	24
BAB II GAMBARAN UMUM MAROS	25
2.1 Kondisi Geografis Maros	25
2.2 Kondisi Sosial Budaya Maros	30

2.3 Maros Masa Prakolonial	40
BAB III PERKEMBANGAN PARIWISATA BANTIMURUNG.....	44
3.1 Bantimurung Sebagai Monumen Alam.....	44
3.2 Bantimurung Sebagai Kawasan Konservasi	59
3.3 Bantimurung Sebagai Taman Wisata Alam Bantimurung.....	63
BAB IV PENGELOLAAN WISATA ALAM BANTIMURUNG.....	73
4.1 Peran Pemerintah daerah Kabupaten Maros	73
4.2 Peran Masyarakat Lokal.....	84
4.3 Pengelolaan Penangkaran Kupu-kupu	86
4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	91
4.5 Marketing Promotion Wisata Bantimurung.....	95
4.6 Dampak Pengelolaan Pariwisata Bantimurung.....	102
BAB V KESIMPULAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	119
BIODATA PENULIS	149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta administrasi Sulawesi Selatan tahun 1944	26
Gambar 3.1 Lukisan Payen Pemandangan Air Terjun Bantimurung.....	46
Gambar 3.2 Air Terjun Bantimurung.....	49
Gambar 3.3 Pasanggrahan Bantimurung	50
Gambar 3.4 Orang Eropa di Tepi Kolam Bantimurung Pada Tahun 1933.....	51
Gambar 3.5 Perwira Shooting Club piknik di Bantimurung.....	52
Gambar 3.6 Foto Orang Eropa di Depan Air Terjun Bantimurung	53
Gambar 3.7 Rombongan Orang Eropa Yang Mengunjungi Bantimurung	54
Gambar 3.8 Sungai dan Kolam Renang Destinasi Wisata Alam Bantimurung	55
Gambar 3.9 Bagan Struktur Pengelola Wisata Bantimurung Tahun 1971	62
Gambar 3.10 Museum Kupu-Kupu Bantimurung Pada Tahun 1993.....	70
Gambar 3.11 Gapura dan Jembatan Menuju Museum Kupu-kupu.....	71
Gambar 4.1 Festival Lagu-lagu Pop 93 Yang Diadakan di Wisata Alam Bantimurung.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Areal Sawah Pada Tahun 1938 di Sulawesi Selatan.....	28
Tabel 2.2 Tabel Jumlah Penduduk 16 Distrik Di Maros Pada Tahun 1930.....	33
Tabel 4.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Bantimurung.....	82

DAFTAR ISTILAH

<i>Afdeeling</i>	: Suatu wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Belanda setingkat Kabupaten. Suatu afdeeling biasanya terdiri dari beberapa Onderafdeeling.
<i>Aksesibilitas</i>	: Sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi wisata.
<i>Amenitas</i>	: Segala fasilitas pendukung yang memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di tempat wisata
<i>Atraksi</i>	: Suatu daya tarik dengan nilai tersendiri yang mampu menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke tempat tersebut
<i>Chinese Officieren</i>	: Institusi khusus buat orang Cina
<i>Distrik</i>	: Pembagian wilayah administratif di Indonesia
<i>Gallarang Appaka</i>	: Suatu rumpun kerajaan yang berada di selatan Maros yang diberikan nama oleh pemerintah Belanda agar memudahkan pembagian administratif
<i>Guilder</i>	: Mata uang Belanda
<i>Karst</i>	: Kawasan batu gamping
<i>Keresidenan</i>	: Sebuah wilayah administratif yang ada di Hindia-Belanda yang dikepalai oleh Residen
<i>Koninklijk Java Motor Club</i>	: Organisasi pemilik kendaraan baik motor maupun mobil di Hindia-Belanda
<i>Konservasi</i>	: Upaya pengelolaan sumber daya alam dengan berpedoman pada asas pelestarian
<i>Lebbotengae</i>	: Kerajaan-kerajaan yang berada pada wilayah dataran tinggi atau pegunungan Maros
<i>Natuurmonument</i>	: Monumen alam
<i>Nomenklatur</i>	: Tata nama atau sebutan ringkas untuk mengidentifikasi suatu jabatan.
<i>Onderafdeeling</i>	: Suatu wilayah administratif yang setingkat dengan kewedanan.

<i>Oto</i>	: Mobil
<i>Pesanggrahan</i>	: Rumah peristirahatan atau rumah penginapan yang biasanya milik pemerintah
<i>Sie</i>	: Seksi
<i>Stalaktit</i>	: Batuan kapur yang tersusun berbentuk kerucut di langit-langit gua.
<i>To Manurung</i>	: Orang yang dipercaya turun dari langit
<i>Toakala</i>	: Legenda Raja Kera Putih
<i>Todo Lima</i>	: Sebutan dari lembaga persekutuan antara lima kerajaan yang merupakan satu rumpun dengan membentuk perhimpunan dalam satu federasi.
<i>Vereeniging Toeristenverkeer</i>	: Badan Pariwisata Belanda.
<i>Visiting Friends and Relatives</i>	: Mengunjungi teman atau kerabat

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DI/TII	: Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
DTI	: Dewan Tourisme Indonesia
IUCN	: International Union Conservation of Nature and Natural Resource
KMJC	: Koninklijk Java Motor Club
KM ²	: Kilometer Persegi
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPN	: Kepala Pemerintah Negeri
MDPL	: Meter Diatas Permukaan Laut
NIT	: Negara Indonesia Timur
PPA	: Perlindungan dan Pelestarian Alam
PT	: Persero Terbatas
PU	: Pekerjaan Umum
PUD	: Perusahaan Umum Daerah
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UNWTO	: United Nations World Tourism Organization
VFR	: Visiting Friends and relatives
VOC	: Verenigde Oost- Indische Compagnie
VTV	: Vereeniging Toeristenverkeer
YAPTI	: Yayasan Pendidikan Tuna Netra Indonesia
YTI	: Yayasan Tourisme Indonesia

ABSTRAK

Muhammad Rijal, F061191029 “Destinasi Wisata Bantimurung Tahun 1919-1993” Dibimbing Oleh Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum dan Drs. Abd Rasyid Rahman, M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek perkembangan pariwisata yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas pada destinasi wisata Bantimurung, serta bagaimana pengelolaan wisata alam Bantimurung baik terhadap peran pemerintah daerah maupun dampak yang dihasilkan pariwisata Bantimurung terhadap masyarakat. Metode penelitian menggunakan metode sejarah dengan melakukan tahapan penelitian yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelusuran sumber primer berupa arsip-arsip dan wawancara. Selain itu penelitian ini menggunakan sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah Bantimurung merupakan destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi sejak zaman Hindia-Belanda hingga didirikannya museum Kupu-kupu Bantimurung pada tahun 1993. Ketersediaan perangkat penting dalam upaya perkembangan pariwisata sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda seperti atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Setelah masuk pada pemerintahan Jepang sampai pada awal pemerintahan Indonesia Bantimurung tidak mengalami perkembangan karena ketidakstabilan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang menyebabkan wisatawan untuk tidak melakukan perjalanan rekreasi atau berwisata, sehingga pada periode-periode tersebut destinasi wisata alam Bantimurung tidak mengalami perkembangan. Perkembangan secara signifikan mulai terjadi sejak 1981 setelah Bantimurung dinyatakan secara resmi melalui surat ketetapan sebagai kawasan wisata alam Bantimurung seluas 18 Hektar. Kemudian dalam perkembangannya banyak pihak yang berperan penting untuk kemajuan destinasi wisata Bantimurung seperti pemerintah daerah Kabupaten Maros, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dan masyarakat-masyarakat lokal. Selain itu banyak dampak-dampak positif yang ditimbulkan baik untuk daerah Kabupaten Maros maupun untuk masyarakat lokal.

Kata Kunci: Destinasi, Wisata, Bantimurung

ABSTRACT

Muhammad Rijal, F061191029 "Bantimurung Tourist Destinations 1919-1993" Supervised by Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum and Drs. Abd Rasyid Rahman, M.Ag.

This research aims to determine aspects of tourism development, namely attractions, amenities and accessibility at the Bantimurung tourist destination, as well as how Bantimurung natural tourism is managed, both regarding the role of local government and the impact Bantimurung tourism has on the community. The research method uses historical methods by carrying out research stages, namely source collection, source criticism, interpretation, and historiography. Searching for primary sources in the form of archives and interviews. Apart from that, this research uses secondary sources in the form of books, journals, articles and other scientific works.

The results of this research are that Bantimurung is a natural tourist destination that has been busy visiting since the Dutch East Indies era until the establishment of the Bantimurung Butterfly Museum in 1993. The availability of important tools in efforts to develop tourism has existed since the Dutch East Indies government, such as attractions, amenities and accessibility. After entering the Japanese government until the beginning of the Indonesian government, Bantimurung did not experience development due to unstable political, social and economic conditions which caused tourists not to go on recreational trips or tours, so that during these periods the natural tourist destination of Bantimurung did not experience development. Significant development began to occur in 1981 after Bantimurung was officially declared through a decree as a Bantimurung natural tourism area covering an area of 18 hectares. Then, in its development, many parties played an important role in the progress of the Bantimurung tourist destination, such as the regional government of Maros Regency, the Bantimurung Bulusaraung National Park Office and local communities. Apart from that, there are many positive impacts both for the Maros Regency area and for the local community.

Keywords: Destinations, Tourism, Bantimurung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia mulai berkembang sejak abad ke-20, tepatnya sejak dibentuknya lembaga kepariwisataan yang oleh pemerintah Hindia-Belanda yang bernama *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV) pada tanggal 13 April 1908 di Batavia. Tujuan awal dibentuknya VTV yaitu untuk mengembangkan kepariwisataan di Hindia-Belanda, pengembangan ini dilakukan dengan cara mengenalkan wisata-wisata yang ada di Hindia-Belanda khususnya di Jawa dengan memberikan informasi atau membuat reklame yang kemudian disebar ke luar negeri, kegiatan pengembangan ini diakhiri pada tahun 1942.¹ Aktivitas pariwisata Indonesia baru benar-benar terlihat pada tahun 1910-1920, dua tahun setelah diputuskannya *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV) sebagai lembaga kepariwisataan pemerintah Hindia-Belanda, dilihat dari promosi-promosi pariwisata yang dilakukan seperti menerbitkan *guide book* kepariwisataan di Indonesia. Walaupun pada masa itu kegiatan kepariwisataan di Indonesia masih sangat terbatas, hanya kalangan dari orang-orang kulit putih.²

Sulawesi Selatan mulai terlibat dalam kegiatan pariwisata diawali dengan kunjungan *Koninklijk Java Motor Club* (KMJC), mereka melakukan kegiatan perjalanan di Sulawesi Selatan. KMJC sendiri merupakan organisasi pemilik kendaraan baik motor maupun mobil di Hindia-Belanda dan rutin menerbitkan

¹ Achmad Sunjayadi, *Pariwisata Di Hindia-Belanda (1891-1942)*, (Jakarta: keputakaan Populer Gramedia, 2019), hlm 3.

² Bungaran Antonius Simanjuntak, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hlm 14.

buku panduan perjalanan di suatu daerah yang telah dikunjungi, yang berisi informasi-informasi yang bermanfaat utamanya yang akan melakukan kegiatan pariwisata. Begitu pula di Sulawesi Selatan, KMJC menerbitkan buku panduannya pada tahun 1928 setelah mereka mengunjungi Sulawesi Selatan. Dapat dibuktikan setahun setelahnya berlabuh kapal wisata *Franconia* di pelabuhan Makassar pada tahun 1929. Tidak lama setelahnya yaitu pada tanggal 10 Desember 1929 maka VTV menjalin hubungan kerja sama dengan Gubernur celebes yaitu *L.J.J Caron* yang menjabat pada tahun 1927-1933. Sejak dijalinnya hubungan kerja sama tersebut maka Sulawesi Selatan resmi menjadi tempat tujuan wisata.³

Bantimurung sendiri yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata pada yang berada di Maros yang terkenal dengan destinasi wisatanya dari zaman kolonial sampai saat ini. Sebelum menjadi Kecamatan Bantimurung, wilayah Bantimurung dahulunya merupakan bagian dari Kerajaan Simbang yang mana Bantimurung merupakan salah satu yang termasuk dalam wilayah hukum Kerajaan Simbang, diantaranya yaitu Samanggi, Tanete, Bontobua, Tanatakko, Nipa, Sege-segeri, Banyo, Bontokamase, Sambueja, Camba-camba, Rumbia, Allu, Bukkanmata, Tallasa, Bonto'padinging, Pakalu, Garangtiga, Pattene, Samapakang, Batu Bassi, Pakere, Gantarang, dan Bantimurung.⁴

³ Syafaat Rahman Musaqqat, "Menelisik Aktivitas Pariwisata di Sulawesi Selatan Pada Masa Kolonial (1929-1942)" *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 8. No 2. Tahun 2020, hlm. 153.

⁴ Fahri Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Bunga Rampai Sejarah Maros*, (Makassar: Tohar Media, 2022), hlm 126-129.

Bantimurung merupakan salah satu daerah Kecamatan di Kabupaten Maros yang memiliki luas 173,7 Km², secara astronomis, Bantimurung merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran dan tidak memiliki pantai. Bantimurung terdiri dari delapan daerah administrasi yang memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter diatas permukaan laut (MDPL), daerah tersebut ialah Mattoanging, Minasa Baji, Tukamasea, Alatengngae, Baruga, Kalabbirang, Leang-leang dan Mangeloreng.⁵

Secara administrasi batas wilayah Bantimurung berbatasann langsung dengan empat wilayah lain yaitu disebelah utara: Kabupaten Pangkep, disebelah selatan: kecamatan Simbang, disebelah barat: Kecamatan Turikale dan kecamatan Lau dan disebelah timur: Kecamatan Cenrana.⁶ Bantimurung merupakan salah satu daerah wisata di Sulawesi Selatan sejak zaman kolonial tetapi di zaman itu Bantimurung masih menjadi bagian dari wilayah Simbang, Kecamatan Bantimurung mulai memisahkan diri dan dibentuk pada 1 Juni 1963 dengan berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, yang dikepalai oleh Nomenklatur (Kepala Wilayah) sebelum disebut dengan istilah Camat pada periode tahun 2000-an.⁷

⁵ Putri Dwi Wulandari, “Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Rekomendasi Pengendalian Alih Fungsi Kawasan Pertanian Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros”, *Jurnal Perencanaan Kota*. Vol 2. No 3, Tahun 2022, hlm 220

⁶ *Ibid*, hlm 222.

⁷ Struktur Pemerintahan Kecamatan Bantimurung (<https://Bantimurung.maroskab.go.id>). Diakses pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 16:45 WITA.

Kawasan wisata alam Bantimurung adalah wisata alam yang menyediakan pemandangan alam yang indah seperti pada air terjunnya, gugusan bukit karst, kerajaan kupu-kupu dan lain-lain. hal inilah yang menjadi daya tarik Bantimurung pada orang-orang Eropa sejak zaman kolonial. Kelayakan Bantimurung sudah sejak lama diakui yaitu pada tahun 1856-1857, oleh seorang naturalis Inggris *Alfred Russel Wallace* yang berkunjung ke Maros. Ia mengakui keindahan alam serta Kupu-kupunya, menurutnya banyak spesies Kupu-kupu langka disana yang baru ia lihat, bahkan segala jenis serangga ada disana. Bantimurung pun dikenal hingga mancanegara sebagai “*The kingdom of butterfly*” kerajaan Kupu-kupu terbesar di dunia setelah Brazil.⁸

Kemudian Pada tahun 1915 *Marinus Cornelius Piepers* mengirim surat kepada *sijfert hendrik kooders*, dalam surat itu berisikan mengenai keindahan air terjun Bantimurung yang dikelilingi hutan yang khas, Gua-Gua Stalaktit, gugusan karst, Sungai, Kupu-kupu yang banyak bertebaran di tepi pasir di bawah air terjun. Sama seperti kebanyakan orang Eropa lainnya mereka datang mengunjungi Bantimurung dengan alasan yang sama.⁹

Berdasarkan keputusan dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang tercatat dalam lembar statistik monumen alam Hindia-Belanda No 90 dengan menunjuk secara resmi sebelas daerah yang di kawasan Hindia-Belanda

⁸ I Nyoman Sirayayasa, DKK, “Manajemen dan Sejarah Pengelolaan Taman Wisata Alam Bantimurung di Kabupaten Maros”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol 2. No 1, Tahun 2020, hlm 7-8.

⁹ Kamajaya Shagir, Taufiq Ismail dan Usman, *Eksplorasi Literasi Bantimurung Bulusaraung 1745-1942* (Maros: Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, 2018), hlm 5.

diantaranya di Keresidenan Kabupaten Priangan, keresidenan Semarang, Keresidenan Rembang, Keresidenan Pasuruan, keresidenan Bengkulu, Keresidenan Jambi, Provinsi Aceh, keresidenan Manado, provinsi Sulawesi Selatan, keresidenan Ambon, dan Keresidenan Bali dan Lombok. Bantimurung sendiri merupakan *Natuurmonument* yang berada di dalam wilayah Sulawesi Selatan sebagai “*Natuurmonument Bantimoeroeng Waterval*” dengan luas 10 hektar.¹⁰

Pada tahun 1937 terbitlah peraturan pengelolaan hutan Hindia-Belanda yang diatur oleh undang-undang kehutanan Belanda yang dibawahhi oleh *Natuur Bescherming afseling ven's land flantatiun*. Termasuk wilayah air terjun Bantimurung yang merupakan monumen alam masuk kedalam wilayah pengelolaan konservasi kehutanan.¹¹ Pada tahun 1957 dipecahnya beberapa daerah otonom yang terdiri dari Makassar, Gowa dan Takalar-Djeneponto, kemudian Bantimurung termasuk dalam wilayah otonom Makassar atau wilayah Maros-Pangkadjene. Selain itu wilayah lingkungan kehutanan diatur langsung oleh Jawatan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan ini berdasarkan pada surat keputusan kepala inspeksi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.¹²

¹⁰ Pandji Yudistira, *Sang Pelopor: Peranan Dr. S.H. Kooders Dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*”. Staatsblads Van Nederlandsch-Indie 1919 No. 90. *Natuurmonumenten Aanwijzing Van Terreiden Als Natuurmonumenten*. Besluit Van den Gouverneur-Generaal Van Nederlandsch-indie Van 21 Februari 1919.

¹¹ Vitasari *Loc.Cit*.

¹² *Inventaris Arsip Maros Volume I*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 1957. No. Reg. 125)

Setelah itu Bantimurung tetap didalam pengawasan kehutanan dari tahun 1961 dibawah teknik Jawatan Kehutanan, lalu tahun 1966 di bawah direktorat Kehutanan dan pada tahun 1967 dibawah organisasi kehutanan dan perlindungan alam.¹³ Jika dilihat dari pengelolaan pariwisata Indonesia yang benar-benar mengelola pariwisata di Indonesia jatuh pada tahun 1957-1960, yang dikelola oleh Dewan Tourisme Indonesia (DTI). DTI berperan sebagai pendamping pada lembaga atau yayasan di daerah yang memiliki destinasi wisata yang bertindak sebagai perwakilan pemerintah.¹⁴

Pada tahun 1971 berdasarkan dengan surat keputusan tanggal 8 Maret 1971 ditetapkannya sistem pengelolaan baru mengganti sistem pengelolaan yang lama. Dengan melihat hal ini pengelolaan Bantimurung akan semakin ditingkatkan, peningkatan pengelolaan ini dilakukan berdasarkan dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung. Upaya peningkatan pengelolaan ini seperti menetapkan beberapa petugas dan pengawas. Petugas dibagi menjadi dua bagian yaitu petugas harian dan petugas mingguan. Para petugas yang dipimpin oleh seorang komandan dan empat anggota dari Pagar Pradja. Petugas tersebut memiliki tugas untuk memelihara kawasan destinasi Bantimurung. Lalu petugas tersebut bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maros. Tidak hanya

¹³ I Nyoman Sirayayasa, DKK, *Op.Cit* Hlm 5.

¹⁴ H. Kodyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Gramediasarana Indonesia. 1996), hlm 62.

petugas, sementara pengawas dibagi dalam bentuk tim yang bersifat umum yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maros.¹⁵

Kemudian pada tahun 1981 Bantimurung Beralih fungsi menjadi taman wisata alam yang bernama “Taman Wisata Alam Bantimurung” dengan luas 18 hektar.¹⁶ Setelah Penetapan tersebut, pada tahun 1988 pembangunan Infrastruktur semakin ditingkatkan. Dalam hal ini pembangunan fasilitas pondok wisata pada destinasi wisata Bantimurung. Pembangunan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung destinasi wisata Bantimurung.¹⁷ kemudian selanjutnya pada tahun 1993 didirikan Museum dan penangkaran Kupu-kupu Daerah Kabupaten Maros yang terletak di kawasan wisata alam Bantimurung. Koleksi-koleksi museum yang ditawarkan sebagian besar adalah Kupu-kupu yang telah diawetkan. Museum juga dilengkapi oleh sebagai suatu media observasi dan pelatihan penangkaran. Museum ini dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata, di bawah pemerintah Kabupaten Maros.¹⁸

Demi mengupayakan pelestarian wisata alam Bantimurung merupakan cagar alam nasional dimulai pada pemerintahan Hindia-Belanda. Maka dari itu perlu adanya kebijakan dalam perlindungan alam kawasan pariwisata Bantimurung. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda wisata alam Bantimurung

¹⁵ *Inventaris Arsip Maros Volume II*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 1971. No Reg 1964).

¹⁶ Vitasari *Loc.Cit*

¹⁷ *Inventaris Arsip Maros Volume II*. (Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 1988. No Reg 1969).

¹⁸ Rusmiyati, DKK, *Katalog Museum Indonesia Jilid II*, (Diterbitkan oleh Direktorat cagar budaya dan Permuseuman. 2018), hlm 374.

yang merupakan bagian dari wilayah kehutanan pemerintah Hindia-Belanda, oleh karena itu wisata alam Bantimurung termasuk dalam kebijakan perlindungan perhutanan yang bertujuan untuk mengawasi seluruh aktivitas pada seluruh cagar alam dan suaka margasatwa di Indonesia, dibawah oleh *Natuur Bescherming afseling ven's land flantatiun* pada tahun 1937-1940.¹⁹

Sedangkan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap cagar alam di Indonesia salah satunya Bantimurung ialah melalui Jawatan kehutanan pada tahun 1956, Jawatan kehutanan memiliki tugas untuk membina hutan agar sejumlah margasatwan dapat meningkatkan untuk kepentingan masyarakat, mengadakan perbaikan dan cadangan-cadangan habitat bagi daerah pembinaan margasatwa, memanfaatkan margasatwa sebagai objek rekreasi tanpa mengurangi fungsi pokoknya, menjaga keutuhan cagar-cagar alam, mengawasi dan melakukan perlindungan terhadap satwa liar yang sering diburu, dan mengadakan riset cagar alam dan margasatwa untuk membina dan bekerjasama dengan instansi-instansi yang penting.²⁰

Pembangunan pariwisata memiliki dampak yang bermacam-macam seperti pada perekonomian dan sosial budaya. Dari aspek ekonomi pariwisata memiliki dampak terhadap peningkatan secara signifikan pada pendapatan Negara yang dapat menopang perekonomian nasional, meningkatkan pendapatan daerah, dan

¹⁹ KSDAE, "Sejarah Organisasi Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem" (<https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>). Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 23:33 WITA.

²⁰ *Ibid*, (<https://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html>)

terciptanya lapangan kerja baru.²¹ Selain dampak perekonomian pariwisata juga mempunyai dampak sosial budaya terhadap masyarakat. Dampak sosial budaya ini terjadi ketika wisatawan berkontak langsung dengan masyarakat setempat seperti wisatawan yang melakukan interaksi jual beli dengan masyarakat, wisatawan dan masyarakat setempat yang sama-sama berkunjung di tempat wisata tersebut, ataupun masyarakat yang berperan menjadi pemandu wisata pada tempat wisata tersebut.²²

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mendorong terjalinnya persentuhan budaya antar etnik dan bangsa. Interaksi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mendorong persentuhan budaya semakin intensif. Oleh karena itu penekanan terhadap ketahanan budaya, integritas sosial, keamanan dan keselamatan, kesehatan publik dan kepuasan penduduk lokal.²³

Berdasarkan uraian diatas Bantimurung merupakan salah satu pariwisata tertua di Sulawesi Selatan dan merupakan yang paling tua di Kabupaten Maros yang bertahan hingga saat ini. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji tentang destinasi wisata alam Bantimurung, walaupun sudah ada beberapa yang meneliti mengenai Bantimurung tetapi yang menjadi pembeda pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan lebih fokus membahas mengenai destinasi wisata alam

²¹ Faizal Hamzah, Hery Hermawan dan Wigati, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal", *Jurnal Pariwisata*. Vol 5. No 3, Tahun 2018, hlm 196.

²² Titing Kartika, "Dampak pengembangan Pariwisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Fisik di Desa Panjalu", *Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata*. Vol 3. No 1, Tahun 2017, hlm 05.

²³ I Nengah Subadra dan Nyoman Mastiani Nadra, "Dampak Ekonomi, Sosial-Budaya dan Lingkungan Pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih-Tabanan", *Jurnal Manajemen dan Pariwisata*. Vol 5. No 1, Tahun 2012, hlm 51.

Bantimurung secara lebih spesifik, pada penelitian sebelumnya membahas Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang mencakup wilayah yang lebih luas termasuk wilayah hutannya, tidak membahas secara spesifik wisata alam Bantimurung dari zaman ke zaman. Selain itu penelitian sebelumnya juga membahas Bantimurung tidak fokus pada wisata alam Bantimurung tetapi sebagian besar membahas pariwisata secara umum.

Pada penelitian yang akan ditulis membahas semua faktor utama perkembangan wisata alam Bantimurung menggunakan konsep pengembangan pariwisata yaitu atraksi (daya tarik), Amenitas (fasilitas pelengkap pariwisata), dan Aksesibilitas (Fasilitas penunjang pariwisata) atau biasa dikenal dengan konsep 3A. Kemudian penulis juga akan melihat peran pemerintah daerah terhadap Bantimurung dan pengelolaan penangkaran Kupu-kupu yang ada di dalam wilayah wisata alam Bantimurung.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana perkembangan destinasi wisata alam Bantimurung tahun 1919-1993?
2. Bagaimana pengelolaan wisata pada destinasi wisata yang berada dalam wilayah Bantimurung tahun 1919-1993?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan terhadap objek yang akan dikaji yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal pada penelitian ini dimulai pada tahun 1919-1993. Tahun 1919 merupakan kali pertama Bantimurung diresmikan sebagai salah satu cagar alam yang ada di Indonesia

pada periode pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan salah satu tempat tujuan wisata pada masa itu. Sedangkan tahun 1993 merupakan tahun berdirinya museum kupu-kupu yang ada di Bantimurung yang merupakan wujud dari penangkaran kupu-kupu yang ada di Bantimurung. Dalam kurun waktu tersebut penulis akan menjelaskan perkembangan sarana-sarana wisata serta pengelolaan wisata pada destinasi-destinasi wisata yang ada di Bantimurung secara administrasi. Batasan Spasial pada penelitian ini adalah destinasi wisata Bantimurung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan destinasi-destinasi wisata yang ada dalam wilayah Bantimurung 1919-1993
2. Untuk mengetahui pengelolaan wisata pada destinasi-destinasi wisata yang ada dalam wilayah Bantimurung 1919-1993

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis, memberikan gambaran perkembangan mengenai wisata alam Bantimurung Dalam kurun waktu 1919-1993 baik perkembangan atraksi dan fasilitas sarana dan prasarananya maupun pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap wisata alam Bantimurung, serta menambah khazanah tentang destinasi wisata alam Bantimurung

Manfaat akademis, menambah kepustakaan yang terkait dengan wisata alam Bantimurung terlebih pada sisi sejarahnya, serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wisata alam Bantimurung.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Penelitian Yang Relevan

Kajian tentang pariwisata telah banyak dilakukan oleh para ahli diantaranya yaitu:

Buku *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, ditulis oleh Bungaran Antonius Simanjuntak. Dalam buku ini dijelaskan konsep-konsep pariwisata, potensi pariwisata dan perkembangan pariwisata dunia dan Indonesia, perkembangan pariwisata di Indonesia dalam buku ini digambarkan secara umumnya saja pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang dan masa Indonesia merdeka.

Buku *Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Mensejahterakan Masyarakat*, yang ditulis oleh Jani Purwendo, DKK. Dalam buku ini dijelaskan tentang keistimewaan alam baik itu berupa hutan, air terjun dan apapun yang berhubungan dengan alam. Buku inipun menjelaskan tentang perkembangan sarana di sekitar industri pariwisata yang disebabkan dari dorongan perkembangan teknologi yang ada seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Sehingga akses untuk membangun suatu pemukiman di suatu daerah termasuk daerah tempat wisata lebih mudah.

Buku *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, yang ditulis oleh H. Khodyat. Dalam buku ini dijelaskan tentang perkembangan pariwisata dari zaman ke zaman. Selain itu dijelaskan juga lembaga-lembaga pariwisata di Indonesia yang bertugas mengelola pariwisata nasional.

Buku berjudul *Pengelolaan Destinasi Pariwisata* yang ditulis oleh Fauziah Eddyono, dalam buku ini dijelaskan mengenai pariwisata di era industri 1.0 sampai ke industri 4.0 dan menuju industri pariwisata 5.0. Selain itu dijelaskan pula tentang dampak yang dihasilkan oleh pariwisata baik itu perubahan mata pencaharian, perilaku sosial dan ketahanan sosial budaya. Tidak hanya itu dalam buku ini menjelaskan pula tentang pentingnya sarana pariwisata dan juga pemberdayaan Sumber daya manusia yang ada.

Jurnal *Manajemen dan Sejarah Pengelolaan Taman Wisata Bantimurung di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*, ditulis oleh I Nyoman Sirayayasa DKK. Dalam jurnal ini dijelaskan perkembangan struktur awal Bantimurung di masa kolonial dan di era pemerintah Indonesia. Di jurnal ini juga dijelaskan keanekaragaman alam Bantimurung serta keberadaan Kupu-kupu Bantimurung yang dijuluki "*Kingdom Of Butterfly*". Selain itu dijelaskan juga mengenai dampak Bantimurung terhadap masyarakat baik itu dari dampak sosial maupun budaya. Perbedaan penelitian pada Jurnal yang ditulis oleh I Nyoman Sirayayasa DKK dengan penelitian yang akan ditulis ialah pada penelitian sebelumnya hanya menyebutkan proses pergantian pengelolaan tanpa menjelaskan cara tata kelola Bantimurung pada tiap periode seperti pada periode Hindia-Belanda, Jepang dan Indonesia, sehingga tidak jelas apa yang terjadi setiap periode Pengelolaan. Selain itu penelitian yang akan ditulis lebih fokus pada setiap aspek yang ada, tidak hanya pada atraksi utama pariwisata tetapi juga aspek penunjang lainnya seperti amenities dan aksesibilitas pada wisata alam Bantimurung. Serta pada penelitian

sebelumnya belum menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah Maros terhadap pariwisata Bantimurung.

Jurnal *Perkembangan Wisata Alam Bantimurung Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya*, yang ditulis oleh Arnita Vitasari DKK. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang kondisi fisik Bantimurung seperti kondisi geologi dan hidrologi, topografi serta iklim. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai sejarah terbentuknya Bantimurung yang pada awalnya ditetapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai *Natuurmonument Bantimoeroeng Waterval* hingga dibawah oleh pemerintah Indonesia dibawah dinas kepariwisataan sebagai taman wisata alam Bantimurung. Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Arnita Vitasari dengan yang akan ditulis oleh penulis ialah pada fokus penelitiannya, Arnita Vitasari fokus pada Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, yang terdiri dari Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap. Sedangkan penulis lebih fokus pada destinasi wisatanya. Selain itu penelitian sebelumnya kurang menjelaskan fasilitas yang terdapat di area taman wisata alam Bantimurung. Serta dalam penelitian sebelumnya juga tidak menjelaskan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Maros terhadap taman wisata alam Bantimurung.

Jurnal *Pengelolaan dan potensi ekowisata di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*, ditulis oleh Lusiani Ferelia Halim. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai potensi wisata yang dapat dikembangkan di dalam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Pengembangan wisata merupakan hal yang sangat penting untuk memikat daya tarik wisatawan. Maka dari itu upaya

kolaboratif masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk pengembangan potensi wisata ini.

Jurnal *Strategi Pengembangan Wisata Alam Dalam Meningkatkan kunjungan Wisatawan di Objek Wisata Umbul Sidomukti Bandungan Semarang*, yang ditulis oleh Evi Rusvitasari dan Agus Solikhin, Jurnal ini menjelaskan tentang keterkaitan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong industri pariwisata. selain daripada itu dijelaskan pula bahwa daya tarik wisata di dasari oleh lima unsur yaitu atraksi wisata, amenitas, aktivitas, aksesibilitas dan promosi.

Jurnal *Pengembangan sarana dan prasarana destinasi pariwisata berbasis budaya di Jawa Barat* yang ditulis oleh Yosef Abdul ghani, Jurnal ini menjelaskan tentang sarana, prasarana dan budaya yang berkaitan dengan pariwisata. sarana dan prasarana dikembangkan dan dikombinasikan dengan budaya yang ada di daerah tersebut sehingga menciptakan suatu keunikan sendiri. Dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang tiga pembagian sarana yaitu sarana pokok (*Main tourism superstructure*), Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing tourism superstructure*), dan sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting tourism superstructure*).

Jurnal *Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Ancillary Twagunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah*. Jurnal yang ditulis oleh lalu Adi Permadi, DKK. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang amenitas, atraksi dan aksesibilitas dalam suatu destinasi wisata. amenitas, atraksi dan

aksesibilitas merupakan komponen penting dalam pengembangan suatu destinasi wisata.

Skripsi *Perkembangan Wisata Alam Bantimurung Pada Tahun 1919-1967*.

skripsi ini ditulis oleh Riska. Skripsi yang ditulis oleh Riska menjelaskan mengenai awal mula ditemukannya Bantimurung sampai ditetapkan menjadi cagar alam nasional bersama dengan cagar alam lain di Indonesia. Kemudian menjelaskan tentang kebijakan kehutanan pusat secara umum yang berlaku pada seluruh kawasan hutan di Indonesia. selain daripada itu dalam skripsi ini juga membahas kepariwisataan secara umum seperti dampak pariwisata secara umum dan kebijakan kehutanan secara umum, tidak terfokus pada Bantimurung.

Perbedaan Penelitian penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Riska ialah, penulis akan benar-benar membahas Bantimurung dengan spesifik secara kepariwisataan, bukan lagi bercerita mengenai gambaran umum pariwisata ataupun menggambarkan destinasi wisata alam Bantimurung dengan menggunakan aspek kehutanan seperti pada penelitian sebelumnya, tetapi lebih fokus pada destinasi wisata Bantimurung. penelitian sebelumnya juga hanya sedikit menceritakan mengenai Bantimurung. Selain itu penelitian sebelumnya hanya menggambarkan fasilitas Bantimurung pada periode sebelum kemerdekaan, sedangkan setelah Indonesia merdeka penulis sebelumnya tidak menggambarkan keadaan fasilitas-fasilitas di destinasi wisata Bantimurung.

Selain kajian tentang pariwisata ada juga beberapa kajian yang membahas mengenai sejarah Maros di antaranya:

Buku *Bunga rampai Sejarah Maros* yang ditulis oleh Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau. Dalam buku ini dijelaskan mengenai keadaan geografis Maros, termasuk membahas mengenai sejarah maros dari zaman kerajaan hingga pada setelah kemerdekaan Indonesia. Maros yang merupakan daerah Onderafdeeling yang tergabung dalam pemerintahan Afdeeling Makassar pada masa Hindia-Belanda hingga terbentuknya Maros menjadi daerah yang berdiri sendiri sebagai daerah tingkat II di Sulawesi Selatan.

Jurnal yang berjudul *Eksistensi Balla Lompoa Karaeng Marusu Sebagai Warisan Arsitektur Bugis Makassar di Kabupaten Maros*, ditulis oleh Andi asmuliany dan Andi Annisa Amalia. Dalam jurnal ini menjelaskan status kerajaan Marusu pada abad ke 17, kerajaan ini pula memiliki rumah ada yang bernama rumah adat *Balla Lompoa*. selain itu dalam jurnal ini juga menjelaskan pemekaran Kecamatan-kecamatan yang ada di Maros.

1.6.2 Landasan Konseptual

Definisi dari kata destinasi tertuju pada makna tujuan atau tempat tujuan wisata.²⁴ Sementara itu menurut UNWTO (*united Nations world Tourism Organization*), destinasi adalah ruang fisik atau ruang tiga dimensi yang memiliki substansi yang memiliki batas-batas fisik dan administrasi yang mencakup campuran dari layanan, produk, serta daya tarik. Daya tarik dari destinasi dapat dibentuk melalui tiga komponen yaitu atraksi, amenitas aksesibilitas, sumber daya manusia, citra dan harga. Kemudian menurut Pearce destinasi wisata adalah

²⁴ Bachruddin Saleh Luturlean, DKK, *Strategi Bisnis Pariwisata*, (Bandung : Perpustakaan Nasional. 2019), hlm 41.

kombinasi dari produk dan layanan yang di satu lokasi yang dapat menarik pengunjung dari luar batas lokasi tersebut.²⁵

Kemudian pengertian wisata menurut Homby As; wisata adalah sebuah perjalanan seseorang ke suatu tempat yang dimana seseorang tersebut singgah sementara di beberapa tempat yang menjadi tujuan perjalanannya, dan pada akhirnya ia kembali lagi di mana ia memulai perjalanan.²⁶ Sementara itu Menurut *Spillane* dalam pitana; Pariwisata adalah suatu perjalan dari satu tempat ketempat lain yang dilakukan perorangan atau satu kelompok yang tinggal sementara sebagai usaha mencari keseimbangan, keserasian dan kebahagiaan dalam lingkungan hidup dalam suatu dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.²⁷

Swarbrooke dan *Horner* membagi wisata dalam beberapa Jenis yaitu: *Visiting Friends and Relatives (VFR)*, merupakan keinginan untuk berkumpul bersama keluarga, teman dan relasi yang tidak bertempat tinggal sama. *Wisata Bisnis*, Kegiatan wisata yang berkaitan dengan hubungan atau kerjasama bisnis. *Wisata Pilgrim*, kegiatan wisata yang berkaitan dengan unsur agama, sejarah, kepercayaan dan adat istiadat yang dianut wisatawan. *Wisata kesehatan*, merupakan perjalanan wisata bertujuan dengan kesehatan, seperti pengobatan penyakit, penyegaran jasmani serta kebugaran tubuh. *Wisata sosial*, kegiatan wisata yang melibatkan banyak orang-orang yang memiliki tujuan sosial. *Wisata Pendidikan*, merupakan perjalanan wisata yang untuk memperoleh wawasan ilmu

²⁵ Fauziah Edyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia. 2019), hlm 124-125

²⁶ Suyitno, *Perencanaan Wisata*, (Yogyakarta : Kanisius. 2001). Hlm 8.

²⁷ Ni Ketut Riani, “Pariwisata adalah pisau bermata 2”, *Jurnal inovasi penelitian*. Vol 2. No 5, Tahun 2021, hlm 1469-1474.

pengetahuan yang lebih luas dengan media pendidikan, contohnya pertukaran pelajar. *Wisata Budaya*, merupakan kegiatan wisata untuk mengetahui seni, adat istiadat, kebiasaan dan cara hidup dalam suatu masyarakat yang berbeda. *Wisata alam*, adalah kegiatan wisata untuk menikmati keindahan alam seperti pada pantai, gunung, air terjun dan lain-lain. *Wisata hedonistik*, kegiatan wisata yang didorong oleh keinginan sensual yaitu sun, sea, sand dan sex. *Wisata aktivitas*, adalah kegiatan wisata yang didasari oleh keinginan untuk memperoleh pemandangan dan pengalaman baru terkait suatu objek wisata. dan yang terakhir *wisata minat khusus*, kegiatan wisata dengan menikmati satu minat tertentu dari wisatawan baik pada tempat baru maupun yang sudah biasa dikunjungi.²⁸

Menurut Medlik dan Meddleton produk industri wisata yang baik harus dilengkapi dengan semua service yang diberikan kepada wisatawan sejak dia keluar dari rumah hingga tiba di tempat tujuan wisata. Ada tiga unsur yang membentuk produk tersebut *Pertama* daya tarik suatu wisata (atraksi), *kedua* Fasilitas di tempat wisata (amenitas) dan *ketiga* Aksesibilitas destinasi wisata. Produk yang dimaksud merupakan representatif dari konsep perkembangan Pariwisata yang dikenal dengan istilah 3A (atraksi, amenities dan aksesibilitas).²⁹

Kemudian dikembangkan oleh Sunaryo konsep tersebut Sunaryo menjelaskan bahwa konsep pengembangan pariwisata memiliki komponen-komponen utama yaitu Atraksi yang mencakup keunikan dan daya tarik wisata,

²⁸ Asep Ferry Bastian, *Strategi Pengembangan Wisata Kampung*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2001), hlm 19-21.

²⁹ Oka A. Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2014), hlm 165.

Amenitas yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata, Aksesibilitas yang mencakup kemudahan sarana dan transportasi, Fasilitas umum dan kelembagaan.³⁰ Kemudian Pemerintah Indonesia menerapkan konsep ini dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu wilayah administratif yang memiliki kegiatan kepariwisataan yang dilengkapi dengan adanya daya tarik wisata (Atraksi), fasilitas umum dan fasilitas pariwisata (Amenitas), Aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait.³¹

Atraksi wisata, atraksi wisata dapat dikatakan sebagai objek wisata itu sendiri. Atraksi wisata dibagi menjadi tiga bagian atraksi yaitu atraksi alam, atraksi budaya, dan atraksi buatan. *Amenitas*, merupakan sebuah fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan dan bisa memenuhi kebutuhan wisatawan. Amenitas berhubungan dengan ketersediaan sarana pada destinasi wisata yang dikunjungi seperti penginapan, pasar, hiburan dan lain-lain *Aksesibilitas*, merupakan segala sesuatu yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Dengan demikian komponen dasar dari Aksesibilitas ialah infrastruktur, transportasi, prosedur operasional dan peraturan

³⁰ Khusnul Khotimah Wilopo dan Luchman Hakim, “Strategi Pengembangan Destinasi Budaya (Studi Kasus Pada Kawasan Situs Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)”. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 41. No 1. Tahun 2017, hlm 58-59

³¹ *Ibid* 58

pemerintah. Komponen-komponen tersebut harus masing-masing memberikan kenyamanan pada setiap wisatawan.³²

Kawasan wisata adalah sebuah daerah tertentu yang dikhususkan sebagai wilayah wisata. menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 kawasan pariwisata adalah kawasan yang berfungsi untuk mengembangkan wisata yang memiliki pengaruh pada aspek pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dukungan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.³³ Kawasan wisata alam Bantimurung yang menawarkan pemandangan alam, air terjun dan Kupu-kupunya.

Dalam mengelola wisata baik sarananya maupun hal lain yang menyangkut kepariwisataan dibutuhkan sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia adalah kesiapan, kemauan dan kemampuan usaha manusia dalam partisipasinya dalam mencapai tujuan organisasi. Jika dilihat dari konsep kependudukan sumber daya manusia dapat disetarakan dengan angkatan kerja yang disebut juga dengan pekerja. Jika mengacu terhadap kepariwisataan Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja demi berkembang dan tercapainya tujuan wisata.³⁴

³² Muhammad Ashoer DKK, *Ekonomi Pariwisata*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm 52-53.

³³ Deasy Mulya Sari, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Sarana Prasarana Kawasan Desa Wisata Borobudur", *Modul*, Vol 15, No 2. Tahun 2015, hlm 134.

³⁴ Samsuni, "Manajemen Sumber Daya Manusia", *Jurnal Ilmiah Keislaman dan kemasyarakatan*, Vol 17. No 31, Tahun 2017, hlm 113.

1.7 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari lima bagian seperti yang dijelaskan Dalam Buku Kuntowijoyo “pengantar Ilmu Sejarah” yang terdiri dari beberapa tahap-tahap yaitu Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, Kritik Sumber, Interpretasi dan Penulisan.

Pertama yaitu pemilihan topik, pemilihan topik dilakukan agar dapat mengetahui objek apa yang akan diteliti. selain itu juga memudahkan untuk membatasi batasan geografi yang akan diteliti dan merencanakan batasan waktu. pemilihan topik akan memudahkan garis besar yang akan diteliti.

Pengumpulan sumber merupakan proses pencarian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dalam proses ini peneliti harus benar-benar mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data atau sumber dibedakan menjadi tiga sumber yaitu sumber tertulis, lisan dan benda. Sumber tertulis merupakan pengumpulan sumber yang dilakukan dengan erat kaitannya yang berhubungan dengan tulisan seperti dokumen penting, naskah, prasasti, piagam, babad, buku, koran, hasil penelitian, surat kabar atau majalah atau artikel jurnal. Sumber lisan adalah proses pengumpulan data secara lisan seperti wawancara kepada orang-orang tertentu guna mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang akan diteliti. Sumber benda atau artefak merupakan pengumpulan sumber melihat sisi bendanya seperti artefak, candi-candi ataupun realief.

Kritik sumber merupakan hal yang penting dalam penelitian sejarah, pada proses kritik ini peneliti melihat dan memilih sumber dengan teliti, karena sering kali ditemui sumber yang keasliannya masih dipertanyakan. Fungsi kritik adalah untuk mempertanggung jawabkan kebenaran suatu sumber yang diteliti. Kritik dibedakan menjadi dua yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik Internal merupakan proses kritik yang melihat sisi dalam dari suatu sumber seperti isinya atau asal usul dari suatu sumber tersebut serta melihat apakah sumber tersebut telah diubah isinya oleh orang tertentu, sedangkan kritik eksternal adalah melihat sisi luarnya dengan menegakkan otentisitas dan integrasi sumber tersebut. Dengan kritik sumber kita bisa melihat sinkronisasi antara luaran dan isi suatu sumber yang diteliti tersebut.

Interpretasi merupakan tahap yang dilakukan setelah kritik sumber, tahap interpretasi adalah tahap penafsiran suatu penelitian, tahap ini penting sebelum melakukan tahap akhir yaitu penulisan. Sumber sejarah yang lolos verifikasi akan ditafsirkan melalui tahap ini kemudian ditulis di tahap selanjutnya yang merupakan tahap akhir.

Penulisan merupakan tahap akhir dalam metode sejarah, di tahap ini penulis akan menyampaikan penafsirannya yang telah direkonstruksi seimajinatif mungkin, sesuai jejak masa lampau yang dituangkan dalam karya tulis menjadi suatu kisah dalam peristiwa sejarah, jadi di tahap ini penulis harus menyampaikan gambarnya mengenai apa yang terjadi pada masa lampau.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Pada bab ini berisi gambaran umum terkait dengan Maros.

Bab III, Pada bab ini membahas mengenai sarana-sarana pada Destinasi-Destinas yang terkait dengan wisata di Bantimurung pada tahun 1919-1993.

Bab IV, Pada bab ini membahas mengenai Pengelolaan pada Destinasi-Destinas Wisata di Bantimurung pada tahun 1919-1993

Bab V, Pada bab ini merupakan bab penutup sekaligus Kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM MAROS

2.1. Kondisi Geografis Maros

Maros memiliki luas wilayah sebesar 1619,11 KM², Maros terletak pada bagian barat Sulawesi Selatan antara 5°01'04.0" Pada lintang selatan dan bujur timur 119°34'35.0". Secara administratif wilayah Maros sekarang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah seperti pada sisi utara Maros berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, disebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, lalu di sisi barat berbatasan dengan Selat Makassar dan pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone. Ketinggian wilayah Maros berada pada 0-2000 meter di atas permukaan laut. Pada bagian barat ketinggian wilayah berkisar dari 0-25 meter di atas permukaan laut dan pada bagian timur ketinggian wilayah berkisar dari 100-1000 meter di atas permukaan laut.¹ Akan tetapi menurut peta administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1944, wilayah Maros berbatasan langsung dengan beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Di bagian Utara Maros berbatasan dengan Pangkep dan Barru, kemudian di bagian Timur berbatasan dengan Bone dan Sinjai, di bagian selatan berbatasan dengan Makassar dan Gowa, di bagian Barat berbatasan dengan Selat Makassar.² Batasan-batasan wilayah Maros dapat dilihat di gambar pada peta berikut ini.

¹ Geografi Kabupaten Maros (<https://maroskab.go.id>). Diakses pada Rabu 29 November pukul 13:40 WITA.

² R.K Sutherland. Allied Geographical Section. Information Of Military, *SWAPA Special Report* 1944 No. 80 Makassar SW Celebes 1981), hlm 186.



Gambar 2.1 Peta administrasi Sulawesi Selatan tahun 1944
(Sumber: R.K Sutherland. Allied Geographical Section. Information Of Military, SWAPA Special Report 1944 No. 80 Makassar SW Celebes 1981).

Wilayah Maros meliputi wilayah pantai sepanjang 31 KM di selat Makassar, wilayah pantai ini pada umumnya dijadikan sebagai tambak ikan dan sebagai daerah penangkapan hasil-hasil laut. Kemudian dari wilayah pantai ke timur merupakan daerah dataran rendah yang cukup luas, daerah ini dijadikan sebagai daerah penghasil pangan pertanian oleh penduduk setempat. lalu pada daerah dataran tinggi yang merupakan daerah-daerah pegunungan dijadikan masyarakat sebagai wilayah perkebunan.³

Pada tahun 1666-1669 pasca perjanjian *Bungayya* VOC menetapkan dan menjadikan wilayah yang ada di sekeliling Gowa-Tallo sebagai daerah kekuasaan langsung oleh karena itu Maros, Pangkajene, Bantaeng dan Bulukumba dijadikan oleh VOC sebagai daerah kekuasaan langsung dengan status Propinsi. Maros dan Pangkajene sebagai provinsi bagian utara (*Norder Proviencie*), sedangkan Bantaeng dan Bulukumba sebagai Provinsi bagian selatan (*Zuider proviencie*).⁴ Setelah itu pada tahun 1805 wilayah Maros pernah dikuasai oleh Kerajaan Bone dengan alasan pada saat itu Kerajaan Bone ingin memperluas wilayah kekuasaannya.⁵

Kemudian pada tanggal 16 Mei 1923 *Onderafdeeling* Maros memiliki kesatuan masyarakat adat yang berjumlah 16 distrik, masing-masing masyarakat adat dibagi atas tiga bagian federasi yaitu *Todolima* yang mencakup wilayah

³ Agusalim, *Potret maros*. (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 1997/1998), hlm 6

⁴ Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Bunga Rampai Sejarah Maros*, (Makassar: Tohar Media, 2022), hlm 661.

⁵ Simon Sirua Sarapang, *Onderafdeeling Maros Konfigurasi Elit Dan Kontestasi Kekuasaan 1900-1946*, (Makassar : Pustaka Sawerigading. 2016), hlm 28-31.

Marusu, Tanralili, Lau, Bontoa, Simbang dan Turikale. *Gallarang Appaka* yang mencakup wilayah Bira, Biringkanayya, Sudiang dan Moncongloe. Wilayah *Lebbotengae* mencakup wilayah Camba, Cenrana, Mallawa, Gattarang Matinggi, Wanuwawaru dan Laiya, pembagian di setiap wilayah dibagi berdasarkan letak geografisnya.⁶

Tabel 2.1 Luas Areal Sawah Pada Tahun 1938 di Sulawesi Selatan

Afdeeling	Onderafdeeling	Luas sawah (ha)
Makassar	Pangkajene	18.860
	Maros	20.554
	Gowa	24.148
	Jeneponto-takalar	21.947
Bonthain	Bonthain	1.646
	Bulukumba	6.629
	Sinjai	7.635
	Selayar	-
Bone	Bone	40.000
	Soppeng	12.535
	Wajo	47.172
Pare-pare	Barru	8.396
	Pare-pare	4.176
	Pinrang	13.056
	Sidenreng-Rappang	31.635
Mandar	Polewali	3.500
	Majene	16.400
	Mamuju	-
	Mamasa	6.000
	Makale-Rantepao	3.500
	Palopo	16.400

⁶ *Ibid*, hlm 36-37.

Luwu	Masamba	10.070
	Malili	-
	Kolaka	1.000
Kota besar Makassar	Makassar	4.022
Total keseluruhan	Sulawesi Selatan	334.581

(Sumber: Adil Akbar, Berre' Ri Sulawesi Maniang: Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran Hingga Penyelundupan Beras (1946-1956), *Pangadereng*, Vol. 5. No. 1. 2019)

Dapat diamati bahwa luas areal persawahan yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1938 seluas 334.581 hektar, Maros yang merupakan salah satu bagian dari daerah di Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah persawahan yang cukup luas sebesar 20.554 hektar yang menjadikan Maros sebagai daerah yang memiliki luas persawahan terluas keenam di Sulawesi Selatan dan terluas ketiga di daerah *afdeeling* Makassar di bawah *Onderafdeeling* Gowa seluas 24.148 hektar dan Jeneponto-Takalar seluas 21.947 hektar.⁷

Pada perkembangan administrasi Kabupaten Maros, di tahun 1947 Maros menjadi daerah Swapraja baru yang dulunya merupakan daerah *Onderafdeeling* wilayah kontrolir Belanda. Pada tahun ini pula Maros diberikan kedudukan *Neo Swapraja* (swapraja baru) dengan sebuah hadat *tellumpeccoe* Maros, yang terdiri dari 16 wilayah adat yakni Marusu, Turikale, Simbang, Lau, Tanralili, Camba, Bontoa, Daya, Cenrana, Gantarang Matinggi, Mallawa, Biringkanayya, Waru, Sudiang dan Moncongloe. Kemudian pada tahun 1950 dilakukan penataan pemerintahan oleh pemerintah NIT dengan mengubah kata "*afdeeling*" dengan "daerah" dan "*Onderafdeeling*" dengan kata "kewedanan". Dalam peraturan ini

⁷ Adil Akbar, "Berre' Ri Sulawesi Maniang: Dari Produksi, Perdagangan, Pelayaran, Hingga Penyelundupan Beras (1946-1956)". *Jurnal Pangadereng*, Vol. 5. No.1. Tahun 2019, hlm 150.

Maros merupakan salah satu dari daerah kewedanan Makassar.⁸ Kemudian pada tahun 1952 pembentukan daerah Makassar yang berlokasi di Sungguminasa, yang meliputi daerah Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros dan Pangkep.⁹

Maros sendiri merupakan wilayah yang dikepalai oleh seorang KPN (Kepala Pemerintah Negeri) yang dipimpin pertama kali oleh Andi Daeng Peppe Masikki (Karaeng Lau), kemudian digantikan oleh Marjan Daeng Mallewa (Karaeng Cenrana), lalu setelah itu digantikan oleh Andi Ahmad Paweloi. Dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1959 setelah terbentuknya daerah tingkat II di Sulawesi Selatan, berdasarkan hal tersebut Maros memisahkan diri dari Makassar dan berdiri menjadi wilayah otonom sendiri dengan status daerah tingkat II Kabupaten Maros dengan bupati pertamanya ialah Nurdin Johan yang dilantik pada 1 Februari 1960.¹⁰

2.2 Kondisi Sosial Budaya Maros

Maros merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Kata Maros pada dasarnya merupakan perubahan bunyi kata dari kata "*Marusu*". Berdasarkan penamaan Maros, tetapi ada beberapa versi antara lainnya: Pertama; kata *Marusu* berasal dari kata "*A'maru*", *A'pamau* atau *Maru-e* yang berarti di madu atau memadu. jika dilihat lebih mendalam kata marusu yang berasal dari kata *maru-e* ini tidak

⁸ Edward L. Poelinggomang. *Mozaik Sejarah Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat*, (Makassar: Pustaka Sawerigading. 2015), hlm 159-160.

⁹ Nasrun Amrullah, *Sekelumit Sejarah Hari Jadi dan Hasil Pembangunan Kabupaten Maros*. (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, 1994), hlm 1.

¹⁰ Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau *Op.Cit.* hlm 667.

sekedar penamaan saja tetapi memiliki kisah sejarah yaitu kisah seorang putri kerajaan Marusu yang dimadu oleh raja lain. Kisah lain juga menyebutkan bahwa Raja Marusu menyukai memperbanyak istri, bahkan bangsawan lainnya pun sama yang dilakukan dengan Raja Marusu.¹¹

Kedua; kata *Marusu* berawal dari kata “*rusung*” dari Bahasa Makassar dan “*Marusung*” dari Bahasa Bugis. dari kata *Rusung* dan *Marusung* memiliki arti yang sama yaitu masyarakat yang berkehidupan sederhana, baik secara kelompok maupun sebagai satu individu. Apabila kata ini dijadikan kata ulang *Arusung-rusung* atau *Marusung-rusung*, maka bermakna sebagai kehidupan seseorang atau kelompok masyarakat yang memiliki kepribadian yang baik terhadap pembawaan diri serta untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi, sikap pantang menyerah masyarakat Maros terus tertanam sebelum mereka mencapai tujuannya.¹²

Ketiga; Maros berasal dari kata “*Ma’roso*”, Kata *Maroso* diambil dari nama pemilik kedai yang bernama *Maroso* yang berada di tengah-tengah kawasan Marusu. Kemudian kedainya tersebut sering dijadikan tempat persinggahan oleh para kafilah yang melakukan perjalanan dari Bone maupun dari Gowa. Apabila rombongan ini saling bertemu di jalan mereka saling menyapa lalu bertanya dimana mereka akan istirahat maka akan dijawab di *Ma’roso*. Sehingga lama

¹¹ Muhammad Asmar, *Kekaraengan Bontoa di Maros*, (Makassar: Refleksi, 2011), hlm 5.

¹² Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Op.Cit.* hlm 3

kelamaan penggunaan kata *ma'roso* populer, sehingga pada suatu waktu menjadi nama suatu daerah yang bernama Maros.¹³

Pada tahun 1930 jumlah penduduk Maros sebanyak 97.777 jiwa yang terbagi dalam 16 distrik. Suku Bugis dan Suku Makassar adalah dua suku yang mendominasi Maros. Persentase Suku Bugis dan Suku Makassar yang mendiami Maros berjumlah 44,96% atau sekitar 43.854 jiwa Suku Makassar yang menetap, sedangkan 54,48% atau sekitar 53.140 jiwa yang tinggal di wilayah Maros adalah Suku Bugis. Jika di total suku Bugis-Makassar yang mendiami Maros berjumlah 96.994 jiwa.¹⁴

Faktor geografis Maros yang menjadi alasan dua suku ini yang mendominasi. secara geografis Maros merupakan daerah peralihan antara wilayah yang dihuni oleh suku Bugis dan suku Makassar. Melihat kondisi geografis Maros yang menjadikan wilayah ini sebagai perlintasan antara dua etnis dan kebudayaan Bugis dan Makassar, pertemuan antara kedua kebudayaan ini saling isi mengisi dan kemudian menjadi medium perpaduan atau akulturasi yang memunculkan budaya baru yang khas.¹⁵ Selain Suku bugis dan Makassar, ada beberapa orang-orang asing yang mendiami wilayah Maros seperti Eropa, Cina dan Asia Lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini jumlah penduduk yang mendiami Maros di masing-masing distrik.

¹³ Muhammad Asmar, *Op.Cit.* Hm 6

¹⁴ R.K Sutherland. Allied Geographical Section. Information Of Military, *SWAPA Special Report* 1944 No. 80 Makassar SW Celebes 1981, hlm 163.

¹⁵ Hasmawati, Isna Jumardi dan Abu Mawahib R, “Tradisi *Mappatabe* dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Tanralili di Kabupaten Maros : Analisis Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Terhadap Pengamalan Sila Kedua Pancasila”, *Jurnal Pena*. Vol.7. No.2. Tahun 2020, hlm 153.

Tabel 2.2 Tabel Jumlah Penduduk 16 Distrik Di Maros Pada Tahun 1930

Distrik	Penduduk asli	Eropa	Chinese	Sebagian orang Asia	Total
Bira	3.731	-	-	-	3.731
Biringkanayya	2.952	-	-	-	2.952
Bontoa	7.752	-	-	-	7.752
Gattarang Matinggi	1.388	-	-	-	1.388
Laija	406	-	-	-	406
Laut	10.656	-	10	-	10.666
Mallawa	4.289	-	-	-	4.289
Maroesoe	13.763	-	-	-	13.763
Montjongloe	1.334	-	-	-	1.334
Simbang	9.715	-	2	-	9.717
Soediang	1.411	-	7	-	1.418
Tanralili	11.752	-	4	4	11.760
Tjamba	4.066	1	-	-	4.067
Tjenrana	5.322	-	-	-	5.322
Toerikale	18.045	28	168	20	18.261
Wanumaroe	951	-	-	-	951
Total Keseluruhan	97.533	29	191	24	97.777

((Sumber: R.K Sutherland. Allied Geographical Section. Information Of Military, *SWAPA Special Report* 1944 No. 80 Makassar SW Celebes 1981).

Dapat dilihat pada tabel diatas 16 distrik yang berada di wilayah Maros didiami oleh beberapa penduduk baik yang lokal maupun penduduk asing. penduduk asing yang mendiami Maros terbagi atas tiga yaitu orang Eropa sebanyak 29 jiwa, Orang Cina sebanyak 191 jiwa dan sebagian lagi orang Asia lainnya sebanyak 24 Jiwa. Jika di total orang asing yang mendiami Maros berjumlah 244 jiwa. Sedangkan penduduk lokal Maros berjumlah 97. 533 Jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk yang menetap di Maros berjumlah sebanyak 97.777 Jiwa.¹⁶

Kemudian pada tahun 1982 menurut data sensus jumlah penduduk Maros yang berkewarganegaraan Indonesia sebanyak 208.410 jiwa, diantaranya 102.216 jiwa laki-laki dan perempuan 106. 194 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang berkewarganegaraan asing sebanyak 52 jiwa, diantaranya 24 jiwa laki-laki dan 28 jiwa perempuan. Dengan demikian Jumlah penduduk yang mendiami Maros pada tahun 1982 sebanyak 208.462 jiwa. ¹⁷ Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan 50 puluh tahun terakhir. Terdapat perbedaan yang cukup jauh sebelum dan setelah Indonesia merdeka.

Pada sekitar tahun 1920-an Maros merupakan daerah di Sulawesi Selatan yang mayoritas masyarakatnya bekerja dengan bertani dan berkebun, tanah-tanah yang digarap merupakan sebagian besar milik *karaeng*, yang disebut tanah *Gaoekang*, dengan demikian orang-orang yang menggarap tanah tersebut harus patuh terhadap sistem yang diterapkan oleh karaeng yaitu sistem bagi hasil atau

¹⁶ Allied Geographical Section *Op.Cit.* hlm 183.

¹⁷ Maros Dalam Angka 1982. *Jumlah Penduduk Maros Pada Tahun 1982.* Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

sistem retribusi, besar kecilnya upah yang harus dibayar tergantung dengan luas tanah yang mereka garap.¹⁸

Selain itu masyarakat pesisir Maros memiliki kegiatan melaut, mereka biasanya menangkap ikan dengan menggunakan pancing atau jaring, kemudian disetiap jumat diadakan tradisi membawakan makanan kepada *Karaeng* untuk disajikan, hidangan yang harus disajikan harus berupa hidangan laut. Hal ini terjadi didasari karena alat penangkap ikan yang baik biasanya dimiliki oleh *Karaeng* dan orang-orang yang menggunakannya harus menunaikan kewajibannya menyajikan hidangan laut kepada *Karaeng*.¹⁹

Persaingan antara elite politik untuk merebut kekuasaan satu sama lain berimbas pada perubahan dan perkembangan sosial yang ada, Perebutan kekuasaan ini didasari dengan tujuan menegakkan kekuasaan, membangun demokrasi dan membebaskan dari intervensi asing-asing. Akan tetapi masing-masing penguasa politik beranggapan bahwa tujuan akan tercapai jika dirinya yang memimpin. Dengan terjadi persaingan politik, perubahan sosial yang akan terjadi yang berpengaruh terhadap sistem sosial masyarakat, nilai-nilai masyarakat, pola, perilaku dan simbol-simbol.²⁰ Tidak hanya itu, pada kenyataannya hubungan antara masyarakat adat, kepala kampung dan masyarakatnya tidak begitu erat karena kurangnya sikap tanggung jawab dari pada

¹⁸ Afd. Cult. En phys Anthropologie van Het, Kon. Instituut Voor de Tropen “Memorie Van Overgave Van de Onderafdeeling Maros Adatgemeenschapegiwjs”. hlm 3.

¹⁹ *Ibid.* hlm 31-32.

²⁰ Simon Sirua Sarapang, *Op.Cit*, hlm 13-15.

kepala adat tersebut, khususnya pada wilayah *Todolima*.²¹ Berbanding terbalik dengan wilayah Camba dan Bira hubungan antara kepala dan masyarakat adat lebih harmonis dan lebih sehat.²²

Akibat dari hubungan yang buruk tingkat kriminalitas di Maros begitu memprihatinkan serta pelaporan kriminalitas kepada yang berwajib begitu buruk, tidak hanya itu masalah-masalah perdata kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena renggangnya hubungan antara kepala dan masyarakat adat.²³ Dapat dilihat kondisi Maros pada awal abad ke-20 tidak begitu baik dikarenakan maraknya terjadi pencurian dan perampokan. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sebuah simbol bahwa di daerah Maros kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak begitu baik.²⁴ Hal ini dilatarbelakangi karena tidak terawatnya dan kurang sehatnya ladang pertanian, hingga menyebabkan gagal panen. Sebagian besar masyarakat Maros mengandalkan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi mereka.²⁵

Selain masalah-masalah diatas ada masalah lain yang tidak kalah penting seperti masalah kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan masyarakat tidak terlalu diperhatikan, kegagalan panen dan menurunnya hasil tangkapan ikan bagi masyarakat pesisir, menyebabkan makin turunnya konsumsi utama bagi masyarakat. Keadaan ini sudah terjadi bertahun-bertahun. makanan pengganti

²¹ Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 2006. *Memorie van overgave W.G Van Der Wolk, Controleur Van Maros*, hlm 131-132.

²² *Ibid*, hlm 137.

²³ *Ibid*, hlm 141.

²⁴ Simon Sirua Sarapang, *Op.Cit*, Hlm 97-98.

²⁵ *Memorie van overgave W.G. Van Der Wolk, Controleur Van Maros. Op.Cit*, hlm 144.

yang dijadikan konsumsi sehari-hari ialah *sikappa* (batang pisang), itupun makanan pengganti tersebut sudah menipis yang mengakibatkan kondisi fisik dan kesehatan masyarakat makin menurun.²⁶

Pada bidang pendidikan Maros juga kurang baik, jumlah sekolah-sekolah di Maros belum memadai dan bangunan-bangunan sekolah hanya seadanya. Sebagian besar sekolah pada wilayah *Onderafdeeling* tidak pernah di inspeksi dan kurang mendapat perhatian. Sudah ada pengusulan untuk sekolah yang lebih lanjut tetapi tidak ada keberlanjutan dari usulan tersebut. Selain bentuk fisik pada sekolah, komponen-komponen sekolah yang tidak kalah penting pada saat itu ialah Pengawas sekolah, tetapi pengawas tersebut tidak memenuhi syarat bagi tugasnya, guru-guru yang kurang mendapat pendidikan sebagai guru, serta ketersediaan buku-buku pelajaran di sekolah yang tidak ada.²⁷

Maros pernah dihuni oleh orang oleh Cina begitu lama dan semakin berkembang, bahkan Belanda mendirikan institusi khusus buat orang Cina yang bernama *Chinese Officieren*, Institusi yang mengawasi secara langsung kaum Cina di Maros, kepala kaum Cina diberikan gelar Letnan Cina yang setara dengan *Karaeng*, *Arung*, atau *gallarang* yang berpangkat *Regent*. Agar mereka tertib terhadap pemerintahan Belanda. Awal kedatangan Cina datang ke Maros sekitar abad ke XV, dalam perkembangannya imigran Cina semakin banyak terlebih pasca perjanjian Bongayya, ini disebabkan peluang perdagangan semakin terbuka

²⁶ *Ibid*, hlm 145.

²⁷ *Ibid*, hlm 146.

di wilayah Makassar salah satunya di Maros yang merupakan kawasan yang berada dalam satu pemerintahan dengan Makassar.²⁸

Pada masa DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) pada periode 1953 sampai 1965, kehadiran DI/TII cenderung menampakkan ketakutan masyarakat, mereka beberapa kali melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap masyarakat. Situasi ini menjadikan masyarakat tidak dapat beraktivitas secara bebas dan lebih memilih untuk bersembunyi.²⁹

Selain itu mereka melakukan penerapan peraturan yang begitu ketat dan keras terhadap perempuan, penggunaan hijab sebagai salah satu contohnya mereka memaksa para perempuan untuk menggunakan hijab dan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka akan diberikan Sanksi. Ketakutan masyarakat terhadap DI/TII memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas mereka dan lebih memilih bersembunyi, ini menjadikan mereka sebagai masyarakat yang Individualis.³⁰

Dengan keberagaman suku Maros juga memiliki berbagai macam kebudayaan khas seperti tari-tarian, ritual, makanan dan lain-lain. pada seni tari Maros mempunyai berbagai jenis tarian seperti Tari Appalili, Tari Kalubampa, Tari Katto Bokko, Tari Kesong-Kesong, Tari Ma'raga, Tari Ma'kampiri, Tari Mallngiri, Tari Mamuri-muri, Tari Pepe-pepe, Tari Salonreng, Tari Tubarania

²⁸ Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Op.Cit*, hlm 638-640.

²⁹ Nur Asma, "Maros Pada Masa DI/TII 1953-1965". Tesis, Makassar. 2015, hlm 13-16.

³⁰ *Ibid*, hlm 13-16.

Marusu dan tari-tarian yang lainnya.³¹ Selain itu masyarakat Maros juga memiliki beberapa ritual seperti *Ammaca tau riolo*, budaya khas Maros ini merupakan budaya yang telah ada sejak dulu jauh sebelum masyarakat Maros memeluk Agama Islam yang diwariskan secara turun temurun. Budaya ini memiliki kepercayaan akan sosok gaib yang memiliki wujud menyerupai manusia (*mae ri langika*) dan sosok manusia yang berubah menjadi buaya (*Mae ri bong*), mereka mempercayai kedua sosok ini sebagai pencipta langit dan bumi serta mampu mempengaruhi masyarakat.³²

Adat istiadat lain yang ada di Maros ialah adat *Katto Bokko*, upacara adat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Marusu yang diwariskan secara turun-temurun oleh pemangku adat kerajaan Marusu. Adat *Katto Bokko* biasa dilaksanakan setiap tahun di lingkungan Kassikebo disekitar area Balla Lompoa. Adat *Katto Bokko* dalam kepercayaan masyarakat dapat diartikan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Kassikebo terhadap Tuhan yang memberi rezeki atas hasil panen yang diperoleh. Selain itu upacara adat ini merupakan pertanda bahwa padi-padi yang ada disana sudah siap untuk dipanen karena masyarakat Kassikebo tidak berani memanen padinya jika upacara ini belum

³¹ Direktorat Maros Pangkep. *Direktori Potensi Wisata Budaya di Kawasan Karst Maros-Pangkep Sulawesi Selatan Indonesia*. (Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar dan Ujung Pandang Heritage Society, 2007), hlm 74-77.

³² Muhammad Amin dan Aisjah, “Nilai-nilai Budaya Lokal *Ammaca Tau Riolo* pada Masyarakat Muslim di Desa Allerae Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros”, *Jurnal Al-Adyan*. Vol.5. No.1. Tahun 2018, hlm 26.

dilaksanakan, maka dengan demikian upacara adat *katto bokko* juga sebagai acuan masyarakat untuk memanen padi.³³

Adat lain yang dimiliki Maros ialah budaya *Assuro Maca* atau *Ma'bacabaca*, Adat istiadat yang masih tetap dilestarikan secara turun temurun. *Assuro Maca* juga dapat diartikan membaca doa secara bersama merupakan tradisi luhur yang memiliki makna suatu ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diterima, berdoa agar terhindar dari hal jahat, mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar.³⁴

Selain tarian dan ritual adat istiadat Maros juga memiliki makanan khasnya sendiri yaitu Roti Maros. Nama roti ini diambil dari nama asal daerah roti ini dibuat yaitu di Maros. Roti ini berisikan selai srikaya dengan bentuknya yang bulat tetapi ada pula yang berbentuk kotak-kotak yang menjadi ciri khas roti tersebut. Roti ini memiliki keunikannya sendiri yang berbeda dari roti-roti biasa pada umumnya, bahkan Roti Maros sudah terkenal tidak hanya pada daerah Sulawesi Selatan saja akan tetapi sudah terkenal se Nusantara.³⁵

2.3 Maros Masa Prakolonial

Menurut penelitian arkeologi peradaban yang ada di Maros sudah ada sejak 30.000 tahun yang lalu bahkan tidak menutup kemungkinan jauh sebelum

³³ Megawati, Jumadi dan M. Rasyid Ridha, “Adat *Katto Bokko* di Bajubodoa, Maros 2000-2019, *Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 18. No.2. Tahun 2020, hlm 99.

³⁴ Risky Rahim dan Abdul Rahman A. Sakka, “Budaya *Assuro Maca* di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros”, *Journal of Pedagogical and social sciences*. Vol. 1. No.1. Tahun 2021, hlm 60.

³⁵ Murdijati dan Gardjito, *Seri Pusaka Cita Rasa Indonesia: Ragam Kudapan Maluku, Sulawesi dan Kalimantan*. (Yogyakarta: Nigtoon Cookery. 2023), hlm 163

itu sudah ada peradaban. Pernyataan ini didasari dengan penemuan lukisan cap-cap tangan dan gambar babi rusa di Leang Pattae di Maros yang ditemukan pada tahun 1950.³⁶ Akan tetapi Masyarakat Maros sendiri mempercayai awal terbentuknya Maros ialah ketika kedatangan *To Manurung* sama seperti dengan daerah lainnya di Sulawesi Selatan, *To Manurung* pertama kali datang di Maros pada wilayah perkampungan yang bernama Pakere. *To Manurung* sebagai seorang Raja, kemudian diberikan gelar *Karaeng Loe Ri Pakere* pada tahun 1463 M.³⁷

Batas kerajaan Maros Pada waktu itu ialah pada Sebelah Utara dengan Sungai Binanga Sangkara, pada sebelah Timur dengan raja di Pegunungan (tidak termasuk distrik Cenrana Laiya, Camba, Mallawa, Gattarang Matinggi, Langi dan Wanuwuru), pada sebelah selatan dengan Kerajaan Tallo dan pada sebelah barat dengan Selatan Makassar. Kemudian para Pembantu Raja pada saat itu berjumlah empat orang yang bergelar *Toddo Appaka*, lalu setiap pembantu raja disebut *Sullewatang*, Seperti *Sullewatang wara*, *Sullewatang Tangkuru*, *Sullewatang Raya* dan *Sullewatang Lau*.³⁸

Setelah terbentuknya Kerajaan Marusu, tak lama kemudian muncul beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Simbang, Tanralili, Bontoa, Tangkuru, Samanggi dan Kaluku. Dalam perkembangannya Kerajaan Samanggi dan Kaluku melebur dalam kerajaan lain, Samanggi melebur dalam kekuasaan Simbang,

³⁶ Muhammad Gazali, "Lukisan Prasejarah Gua Leang-Leang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan: Kajian Simbol S.K.Langer", *jurnal Imaji*, Vol. 15. No.1. Tahun 2017, hlm 58.

³⁷ Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Op.Cit*, hlm 10.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Cerita Rakyat Daerah Sulawesi Selatan*, (Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1976/1977), hlm 48.

sedangkan Kaluku melebur dalam kekuasaan Marusu. Kemudian pada daerah pegunungan Maros terdapat beberapa kerajaan yaitu Mallawa, Camba, Cenrana, Bengo, Liaya, Labuaja dan Balocci. Seluruh Kerajaan ini berada pada wilayah *Lebbotengngae* (daerah pegunungan Maros).³⁹

Pada perkembangannya Kerajaan Marusu dan Kerajaan Tallo memiliki hubungan politik dan kekerabatan setelah Raja Tallo III *I Mangayoang Berang karaeang Passi*, mempersunting anak perempuan *Karaeng Loe ri Marusu*, yaitu *I Pasilemba Tumamalianga ri Tallo*. Dengan menikahnya mereka hubungan kekerabatan yang di dasari pada hubungan politik kedua kerajaan semakin kuat. Sehingga pada perang antara Gowa dan Tallo tahun 1528, Kerajaan Marusu menjadi satu kesatuan dengan Kerajaan Tallo.⁴⁰

Pada zaman pemerintahan Raja Gowa *Tumap'arisi kallonna*, ia sering melakukan ekspansi terhadap kerajaan-kerajaan sekitar Gowa Seperti Serassi, Katingang, Parigi, Siang, Sdenpeng, Lembangang dan Tallo. Kerajaan Gowa dengan mudah mengalahkan kerajaan-kerajaan lain kecuali Kerajaan Tallo. Penyebab sulitnya ditaklukkan Kerajaan Tallo karena bergabungnya dua kerajaan lain yaitu Maros dan Polombangkeng. Walaupun mereka telah melakukan perjanjian persahabatan dengan Maros dan Polombangkeng, tetapi kedua kerajaan ini tetap mengangkat senjata untuk melawan Kerajaan Gowa. Perang ini berakhir yang ditandai dengan perjanjian yang mempersatukan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo yang berbunyi "*barang siapa yang mengadu domba Gowa dan*

³⁹ Fahry Makkasau dan Isbullah Pallawagau, *Loc.Cit.*

⁴⁰ Edward L. Poelinggomang, *Op.Cit*, hlm 153.

Tallo akan dikutuk oleh dewata”.⁴¹ Setelah kekalahan Tallo oleh Gowa kedua kerajaan ini melebur menjadi satu yaitu Kerajaan Gowa-Tallo. Kemudian masuknya Islam di Kerajaan Gowa yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Raja Gowa XIV dan masuknya Islam di Kerajaan Tallo pada kepemimpinan Raja Tallo ke VI Sultan Abdullah Awwalul Islam, maka Kerajaan Marusu juga resmi ikut memeluk agama Islam pada abad ke-17.⁴²

⁴¹ Abdul Rasjid. *Makassar Sebagai Kota Maritim*. (Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2000), hlm 22-23

⁴² Andi Asmulyany dan Andi Annisa Amalia, “Eksistensi Balla Lompoa Karaeng Marusu Sebagai Warisan Arsitektur Bugis Makassar di Kabupaten Maros”, *Jurnal Linears*. Vol.2. No. 2. Tahun 2019, hlm 66.